


PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM Mendukung TERWUJUDNYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA

Eny Latifah

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

*Korespondensi : eni.lathifah@gmail.com

<p>Info Artikel</p>	<p>Abstrak</p>
<p>Diterima : 21 Juni 2022 Disetujui : 23 Agustus 2022 Dipublikasikan : 31 Agustus 2022</p>	<p>Ekonomi Syariah memiliki peran dalam mendukung implementasi SDGs di Indonesia dengan segala ekosistem produk yang ada. Mulai dengan produk keuangan, aneka makanan dan minuman halal, enterpreuner Islami dan lain-lain.SDGs memiliki 17 tujuan, antara lain, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Peran ekonomi syariah dalam SDGs di Indonesia adalah Karakteristik yang ada dalam keuangan syariah ini cocok untuk mencapai SDGs, seperti dana sosial dan sifatnya yang bebas dari spekulasi. Selain itu, akad-akad yang ada dalam keuangan syariah, khususnya dalam sektor pertanian seperti Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Murabahah, Ba'i Salam serta bisnis yang berbasis syariah dengan produk makanan dan minuman halal dan juga enterpreuer Islami dengan aneka akad syariah seperti Salam dan Ijarah dalam Franchise, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Murabahah dalam perternakan dan pertanian sangat menunjang SDGs.</p>
<p>Kata Kunci: Ekonomi Syariah, SDGs Indonesia, Entrepreneur Islami, produk halal Keyword: <i>Islamic Economics, SDGs Indonesia, Islamic Entrepreneurs, Halal Products.</i></p>	<p>Abstract <i>Sharia Economics has a role in supporting the implementation of the SDGs in Indonesia with all existing product ecosystems. Starting with financial products, various halal food and beverages, Islamic entrepreneurs and others. The SDGs have 17 goals, including, without poverty, without hunger, a healthy and prosperous life, quality education, gender equality, clean water and proper sanitation, energy clean and affordable, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reducing inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, tackling climate change, marine ecosystems, terrestrial ecosystems, peace, justice and resilient institutions, and partnership to achieve goals. The role of Islamic economics in the SDGs in Indonesia is that the characteristics that exist in Islamic finance are suitable for achieving the SDGs, such as social funds and their nature that is free from speculation. In addition, the existing contracts in Islamic finance, especially in the agricultural sector such as Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Murabahah, Ba'i Salam and sharia-based businesses with halal food and beverage products as well as Islamic entrepreneurs with various Sharia contracts such as Salam and Ijarah in Franchise, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Murabahah in livestock and agriculture are very supportive of the SDGs.</i></p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan diri sebagai negara maju dan bersanding dengan negara Adikuasa lainnya. Hal ini akan mudah diwujudkan dengan melakukan gerakan perubahan kepada seluruh Sumber Daya Manusia dan diimbangi sarana prasana yang dimiliki dengan mengandalkan skill dan peran dari masing-masing kinerja yang ada.

Fase perubahan Indonesia terlihat lambat meski pada tahun 1990 telah memulai langkah baru dengan menerapkan prinsip dan nilai syariah pada salah satu sektor yakni keuangan. Dimana pada tahun itu mulai ada pencetus Perbankan yang berbasis syariah yang semua sudah mengetahui yakni adanya Bank Muamalat Indonesia. Perubahan yang dimulai dari sektor keuangan dengan adanya lembaga keuangan yang berani menerapkan prinsip dan nilai-nilai Islami dalam operasional dan manajemennya, Meski sampai sekarang penerapan prinsip dan nilai Islami tersebut belum bisa diterapkan 100% namun itu mejadi langkah pasti akan perubahan

Setelah adanya Bank Muamalat diikuti lembaga keuangan syariah lainnya yang kategorinya adalah nonbank seperti koperasi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, pengadaian syariah, leasing syariah, rumah sakit syariah, wisata halal, dan lain-lain. Segala bentuk lembaga keuangan nonbank maupun perbankan pastilah memiliki keunggulan masing-masing yang diwujudkan dalam produk dan akad di masing-masing lembaga.

Produk dan akad-akad yang ada dalam keuangan syariah, khususnya dalam sektor pertanian seperti *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Murabahah, Ba'i Salam* serta bisnis yang berbasis syariah dengan produk makanan dan minuman halal dan juga enterpreuer Islami dengan aneka akad syariah seperti Salam dan Ijarah dalam Franchise, *Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Murabahah* dalam perternakan dan pertanian sangat menunjang SDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs) yang ada di Indonesia memiliki banyak tujuan diantaranya pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan memperhatikan kualitas lingkungan. Lingkungan disini yang harus diperhatikan adalah pertanian, perdagangan (bisnis) dan Lembaga Keuangan.

Dalam pencapaian SDGs perlu adanya kombinasi kinerja dari lingkungan pertanian, perdagangan (bisnis) dan Lembaga Keuangan. Dan hal ini telah dipermudah karena dalam lembaga keuangan syariah telah menerapkan akad-akad syariah dengan bentuk produk-produk yang ada. Dengan penerapan produk dengan akad-akad syariah itulah lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia mulai menunjukkan peran bahwa ekonomi syariah mampu menjadi support terwujudkan SDGs di negara yang terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam.

Peran ekonomi Islam tidak hanya terlihat dalam Lembaga Keuangan Syariah saja namun juga terlihat di sektor pertanian yang mulai menerapkan akad-akad syariahnya didalam melakukan kerjasama untuk pengembangan komoditas dan lahan pertanian. Hal ini perlu dilakukan karena sesungguhnya dalam ajaran agama Islam yang tertuai dalam konsep ekonomi syariah menghimbau kepada ummat untuk selalu mencatat transaksi yang dilakukan dan selalu berpegang teguh dengan ajaran syariah agar terhindar dari perkara yang merugikan satu sama lain.

Keberadaan ekonomi syariah sekarang juga dapat terlihat dari penerapan manajemen syariah yang diterapkan dalam bisnis (perdagangan). Buktinya banyak produk-produk sekarang yang mulai diperhatikan kualitas halal haramnya dan hal ini didukung pemerintah dengan pergerakan pendampingan sertifikat halal untuk seluruh pengusaha dan pebisnis yang memiliki produk halal namun belum tersertifikasi halal.

Dari sinilah peneliti tertarik sekali mengangkat peran ekonomi syariah dalam mendukung terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ada di Indonesia. Dengan harapan masyarakat tidak ragu lagi menerapkan prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam ekonomi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Syariah

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos* yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Ekonomi mencakup kegiatan kontemplasi dalam rangka berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi (Nurzaman: 2019).

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya (Al-Mishri: 1993). Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Paradigma ekonomi Islam dalam tulisan ini terdiri dari gabungan istilah paradigma dengan frase ekonomi Islam. Paradigma disebutkan dalam Alquran dengan sebutan *Tashawwur* yang berasal dari akar kata *shawwar* (Madkur: 1990) dan disebutkan dalam Alquran.

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan

penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah SWT. Dan masyarakat secara keseluruhan (Muhammad: 1994). Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam (Muhammad: 1985), dengan nilai-nilai Islam inilah manusia bisa mencapai *al-falah*.

Ekonomi syariah adalah salah satu bentuk sistem yang dipergunakan agar memenuhi maqashid syariah yang ada. Eny dalam buku Mengenal Lebih Dekat Ekonomi Syariah mengungkapkan bahwa Maqashid syariah telah menuntun kita sebagai umat Islam harus senantiasa bersyukur atas segala apa yang Allah berikan sebagai rezeki bagi kita umat-Nya yang pastinya harus dilakukan usaha (ikhtiar) untuk mendapatkannya. Selain itu, harus selektif atas segala sesuatu yang kita pergunakan dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari (Sufyati,dkk : 2022).

Keenam pola paradigma ekonomi Islam ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut (Veitzhal: 2009):

1. Berdasarkan "*al-Tawhid*" (keesaan Allah SWT.)

Tauhid merupakan konsep ketuhanan dalam Islam yang merupakan asas keimanan dan keyakinan manusia tentang kewujudan dan keesaan Allah SWT.

2. Memiliki kaidah *al-'Ubudiyah* (berbakti / beribadah kepada Allah SWT.)

Ibadah merupakan setiap perbuatan yang disyariatkan Allah SWT. dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. yang diridai Allah SWT. Ia meliputi segala perintah dan larangan serta hal yang diharamkan maupun diharamkan. Ibadah memiliki cakupan yang luas tidak hanya terhadap perbuatan ibadah dan ritual agama, tetapi juga meliputi setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam melaksanakan ekonomi Islam.

3. Manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam.

Manusia adalah makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah SWT dengan sempurna dilengkapi akal serta memiliki kedudukan tertinggi di antara makhluk ciptaan Allah SWT. lainnya.

Manusia memiliki unsur fisik, roh, akal, nafsu. Manusia diciptakan sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba, manusia diwajibkan menyembah Allah SWT., sebagai khalifah, manusia bertugas sebagai makhluk yang bisa membangun, memakmurkan dan menjaga serta memanfaatkan sumber alam yang disediakan oleh Allah SWT. Kedua fungsi inilah yang merupakan hakikat manusia yang berfungsi sebagai pelaku ekonomi Islam.

1. *Mawarid al-thabi'i* (sumber daya alam) sebagai alat pembangunan ekonomi Sumber alam yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah SWT. dan dalam hal ini Allah SWT. menyerahkan amanah dan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan memanfaatkan sumber alam karena

manusia adalah khalifah yang ditugaskan memakmurkan muka bumi. Setiap sumber alam yang diciptakan merupakan alat pembangunan ekonomi untuk memenuhi keperluan hidup manusia seperti makanan, pakaian, perhiasan, peralatan, tempat tinggal, perhubungan, pengangkutan dan sebagainya. Bagi memenuhi keperluan manusia ini, Allah SWT. telah menjadikan segala yang ada dalam alam ini supaya tunduk kepada manusia.

2. *Al-Tawazun* (keseimbangan) antara dunia dan akhirat.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Dalam hal ini manusia dituntut menyeimbangkan antara amalan untuk kebahagiaan di dunia (aspek jasmani) dan amalan untuk kebahagiaan di akhirat (aspek rohani). Kehidupan dunia ini perlu dijadikan medan utama untuk mendapatkan sebanyak mungkin bekal menuju akhirat.

3. Menggapai rida Allah SWT.

Keridaan Allah SWT merupakan tujuan akhir dari ekonomi Islam. Rida Allah SW merupakan nikmat Allah SWT. yang paling besar dan paling utama. Tidak ada harapan yang lebih tinggi dan tidak ada nikmat yang lebih besar selain dari keridaan Allah SWT. Sesuatu pembangunan ekonomi itu menjadi pembangunan ekonomi Islam apabila ia meletakkan keridaan Allah SWT. sebagai tujuan akhirnya. Untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. ini paling tidak manusia perlu memenuhi tiga syarat utama: Pertama, pembangunan ekonomi yang diusahakan harus ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Dengan selalu mentauhidkan-Nya. Kedua, mematuhi segala syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketiga, senantiasa melakukan amalan kebaikan dalam berhubungan dengan Allah SWT. dan berhubungan dengan sesama manusia. Secara lebih terperinci lagi, keridaan Allah SWT. ini akan tercapai setelah semua elemen pola paradigma ekonomi Islam yang dijelaskan sebelum ini diyakini dan dihayati sepenuhnya.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada tahun 2015, 193 negara mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai panduan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2030, untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera di masa kini dan masa mendatang. SDGs didasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Berdasarkan laporan "*The Sustainable Development Goals Report 2018*" yang disusun oleh Bank Dunia, sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam 3 tahun implementasi SDGs seperti menurunnya angka kematian Ibu dan bayi, penurunan angka pernikahan dini, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap energi listrik di seluruh dunia. Meskipun demikian, masih banyak lagi capaian yang masih jauh dari target seperti di bidang

sosial, sanitasi, dan lingkungan. Laporan tersebut menyatakan bahwa melihat kemajuan yang dicapai hingga saat ini, terdapat kekhawatiran bahwa banyak target-target SDGs yang tidak akan tercapai hingga batas waktu 2030 (Mickael: 2015).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs (*Millenium Development Goals*) yang mana memiliki masa berlaku 2015-2030 yang disepakati oleh lebih dari 190 negara dengan memiliki isi tujuan (goals) secara umum mengatur tata cara dan prosedur yakni masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerjasama kemitraan multi pihak (Mickael: 2015).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara pikir yang diadopsi oleh seorang peneliti tentang bagaimana desain riset dalam suatu penelitian tersebut dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan kedepannya. Pendekatan penelitian ini memiliki maksud untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh tempat yang menjadi sasaran objek dalam suatu penelitian (Moeloeng: 1996).

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *mixed method*, yaitu merupakan suatu prosedur penelitian yang menggabungkan antara dua bentuk penelitian yang meliputi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Alasan utama penggunaan metode kombinasi antar pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap masalah penelitian yang lebih baik dengan data yang diperoleh akan lebih valid dibandingkan dengan hanya menggunakan pendekatan penelitian tunggal (samsu: 2017).

Pendekatan dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan terkait peran ekonomi syariah dalam mendukung terwujudnya SDGs (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus disini dapat diartikan sebagai sebuah metode penyelidikan atas suatu peristiwa secara intensif, rinci, dan menyeluruh. Tujuan dari jenis penelitian studi kasus ini adalah untuk mempertahankan suatu objek penelitian dan mengembangkan pengetahuan secara lebih mendalam mengenai sasaran objek yang akan diteliti (Imam: 2016).

Studi kasus merupakan uraian serta penjelasan komprehensif mengenai berbagai macam aspek, yaitu aspek individu, kelompok, organisasi atau komunitas, suatu program ataupun suatu situasi sosial. Sebagai salah satu metode kualitatif, studi kasus memiliki beberapa keuntungan yang meliputi hal-hal sebagai berikut (Deddy: 2013):

- a. Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yaitu menyajikan pandangan subjek yang diteliti.
- b. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dimiliki pembaca dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
- d. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang bukan hanya merupakan konsistensi daya dan konsistensi faktual, tetapi juga kepercayaan (*trust-worthiness*).
- e. Studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas *transferabilitas*.
- f. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti mempelajari semaksimal mungkin suatu kelompok serta kejadian dengan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti terkait peran ekonomi syariah dalam mendukung terwujudnya SDGs (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia.

Sumber data pada suatu penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan berhubungan dengan kualitas hasil dalam penelitian. Sumber data sendiri terdiri atas dua macam, yaitu (Wahyu: 2010):

- a. Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dimana data tersebut didapatkan melalui informasi langsung dari lapangan tempat penelitian yang diperoleh dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian yang telah ditetapkan pada sebuah penelitian. Pada penelitian ini, data primer yang didapatkan oleh peneliti adalah melalui hasil wawancara kepada para informan yang telah ditunjuk.
- b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti yang didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada. Kemudian data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang telah diperoleh dengan menggunakan bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Teknik penggalian data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kualitatif dari para informan yang sesuai dengan lingkup penelitian yang diangkat. Dalam penelitian ini, teknik penelitian data yang digunakan adalah:

- a. Teknik Observasi.

Teknik observasi yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan data pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang menjadi sumber data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia dan proses kerja pada tempat yang menjadi sasaran penelitian.

b. Teknik Wawancara.

Teknik wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan proses tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan hal-hal yang diamati untuk mendapatkan gambaran tentang obyek yang diteliti.

c. Teknik Dokumentasi.

Teknik dokumentasi atau studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat berupa catatan peristiwa yang sudah diperoleh. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data di lokasi penelitian yang berupa catatan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domain. Analisis domain adalah analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari suatu penelitian dengan prosedur analisisnya sebagai berikut:

a. Koleksi data.

Koleksi data merupakan proses pengumpulan data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

b. Reduksi data.

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya diantara data-data yang jumlahnya dianggap terlalu banyak. Hal tersebut digunakan untuk mempermudah peneliti untuk fokus terhadap data yang diinginkan.

c. *Display* data.

Display data merupakan proses penyajian data yang bisa dilakukan dengan membuat bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau teks-teks yang bersifat naratif.

d. Verifikasi atau kesimpulan

Verifikasi atau kesimpulan adalah proses penarikan kesimpulan terhadap data-data yang telah diperoleh.

Keabsahan data penelitian dapat peneliti peroleh melalui berbagai teknik, seperti perpanjangan kehadiran di lapangan dalam rangka melakukan pengamatan dan wawancara yang lebih intensif, triangulasi, dan pembahasan objek penelitian lebih mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program SDGs (*Sustainable Development Goal*/tujuan program berkelanjutan), mengingat ekonomi syariah secara sistem dapat mendukung dalam pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2015, 193 negara mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai panduan arah

kebijakan pembangunan hingga tahun 2030, untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera di masa kini dan masa mendatang. SDGs didasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Berdasarkan laporan “*The Sustainable Development Goals Report 2018*” yang disusun oleh Bank Dunia, sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam 3 tahun implementasi SDGs seperti menurunnya angka kematian Ibu dan bayi, penurunan angka pernikahan dini, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap energi listrik di seluruh dunia. Meskipun demikian, masih banyak lagi capaian yang masih jauh dari target seperti di bidang sosial, sanitasi, dan lingkungan. Laporan tersebut menyatakan bahwa melihat kemajuan yang dicapai hingga saat ini, terdapat kekhawatiran bahwa banyak target-target SDGs yang tidak akan tercapai hingga batas waktu 2030.

Perlu disadari bahwa untuk mencapai target-target SDGs, semua pihak dan semua sektor semestinya ikut berkontribusi. Tulisan ini akan khusus membahas bagaimana peran sektor asuransi dalam pencapaian target-target SDGs dan hal-hal apa yang dapat dimanfaatkan dari sana. Secara praktik, sebetulnya asuransi merupakan salah satu bisnis paling tua di dunia. Berdasarkan catatan sejarah, praktik asuransi sudah ada sejak 3000 SM, yaitu di China dimana para pedagang mengirimkan barangnya dengan cara membaginya dalam beberapa kapal, lalu apabila salah satu kapal tenggelam dalam perjalanan, kerugian akan ditanggung secara bersama oleh semua pedagang, bukan hanya oleh pedagang yang kehilangan barangnya saja. Sedangkan praktik semacam asuransi jiwa pertama kali muncul sekitar 2500 SM yaitu di Yunani dimana masyarakat mengumpulkan iuran yang akan dipakai untuk proses pemakaman apabila salah satu anggota masyarakat disana meninggal dunia.

Dengan sejarah yang telah begitu lama, barangkali kita dapat sepakat bahwa asuransi sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan sangat penting keberadaannya bagi masyarakat, termasuk seharusnya juga bisa berperan penting dalam pencapaian target-target SDGs. Terkait hal tersebut, menurut penulis, paling tidak ada empat peran yang bisa dimanfaatkan dari sektor asuransi dalam pencapaian SDGs, yaitu penanggulangan kemiskinan, mitigasi risiko bencana, penyediaan instrumen jaminan atas proyek-proyek SDGs, dan khusus asuransi syariah, menyediakan alternatif bagi mereka yang tidak tersentuh dengan asuransi konvensional (inklusi asuransi).

Asuransi bisa berperan dalam penanggulangan kemiskinan dengan cara memberikan alternatif mitigasi atas risiko-risiko besar yang meskipun kemungkinan kejadiannya kecil, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Contohnya adalah asuransi jiwa bagi keluarga dimana hanya ayah yang bekerja (*single income*) atau asuransi kebakaran pabrik bagi pengusaha yang mengandalkan penghasilannya hanya dari pabrik tersebut. Kedua risiko tersebut

adalah contoh risiko yang peluang terjadinya sangat kecil tetapi dampaknya sangat besar, bahkan dapat mengubah orang atau keluarga dari golongan mampu menjadi golongan miskin.

Secara teori sebetulnya mitigasi risiko bukan hanya dapat dilakukan melalui asuransi. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan simpanan baik dalam bentuk tabungan di bank maupun dalam bentuk aset-aset lain yang likuid, dalam jumlah yang sangat besar untuk melindungi dari risiko besar yang bisa terjadi (*risk retention*). Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memupuk simpanan dalam jumlah yang sangat besar, apalagi pada saat mereka masih di masa-masa awal seperti pasangan muda atau pengusaha yang baru memulai bisnisnya. Selain itu, asuransi juga memiliki kelebihan dalam bentuk insentif untuk lebih sadar risiko. Hal ini karena perusahaan asuransi biasanya membebaskan premi yang lebih rendah kepada mereka yang mau berusaha menurunkan risiko, misalnya kepala keluarga yang tidak merokok untuk kasus asuransi jiwa atau pabrik yang memiliki fasilitas pemadam kebakaran untuk kasus asuransi kebakaran.

Selain mitigasi atas risiko-risiko yang dihadapi oleh individu (*particular risk*) seperti yang telah disebutkan sebelumnya, asuransi juga bisa menjadi alat untuk mitigasi risiko-risiko yang dihadapi oleh sejumlah besar orang, atau biasa disebut dengan *fundamental risk*. Salah satunya adalah risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau gunung meletus yang berdampak pada puluhan sampai ribuan orang secara sekaligus. Saat ini pemerintah juga telah memiliki perhatian terhadap pembentukan program asuransi bencana, misalnya dengan telah dilaksanakannya asuransi bencana untuk Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.06/2016. Mekanisme asuransi bencana yang lain juga sedang terus dikaji kemungkinan pelaksanaannya.

Asuransi juga bisa mendukung pencapaian SDGs dalam bentuk penyediaan instrumen penjaminan atas proyek-proyek SDGs seperti pembangunan sarana transportasi, listrik, sanitasi dan yang lainnya. Jaminan dimaksud adalah dalam bentuk ganti rugi kepada investor apabila proyek yang dijanjikan gagal untuk diselesaikan. Saat ini mekanisme penjaminan tersebut juga telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dengan adanya mekanisme penjaminan, diharapkan dapat lebih mendorong peran investor swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek SDGs.

Terakhir, asuransi melalui asuransi syariah juga bisa berperan dengan menyasar mereka yang tidak tersentuh dengan asuransi konvensional karena alasan keyakinan. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sejumlah 222 juta orang, bisa jadi kelompok yang tidak mau menerima asuransi konvensional jumlahnya sangat banyak, dan disinilah asuransi syariah bisa berperan. Dengan kontribusi semua sektor termasuk perasuransian, semoga

Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan *progress* paling tinggi dalam hal pencapaian target-target SDGs. (www.kemenkeu.go.id)

Entrepreneur syariah memiliki peran dalam pola produktivitas serta pemasaran terkait dengan makanan dan minuman halal serta produk rumah tangga lainnya agar bisa dikonsumsi masyarakat yang ada di negara Indonesia khususnya serta masyarakat manca negara dengan kegiatan ekspor impornya.

Pelaku wirasusaha memiliki peran penting dalam penyediaan produk yang akan diproduksi serta menjadi produk yang memang dibutuhkan masyarakat dengan melakukan pengawasan dan pengendalian atas bahan pokok serta proses pembuatan sampai pada pemasaran dengan tetap mempertahankan kebersihan dan kehalalan dari produk yang akan dipastikan menjadi konsumsi masyarakat nantinya.

Wirausahawan juga memiliki peran dalam mengontrol mekanisme keuangan dalam penentuan harga produk yang akan dipasarkan. Harga barang disini diharapkan tidak berat bagi konsumen dan juga tidak sampai menimbulkan kerugian bagi produsen.

Apabila harga produk yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat dari kalangan kecil maka produk yang seharusnya terjual tidak akan bisa terjual. Dengan melakukan survei harga pasar mampu menekan tingkat inflasi dari harga barang yang tidak diharapkan melambung tinggi. Hal ini tidak mudah dilakukan karena Sumber Daya Insani yang dimiliki bangsa Indonesia masih minim. Selain factor dari minimnya pengetahuan, fasilitas yang disediakan pemerintah kurang mampu disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah sehingga masyarakat masih minim pengetahuan terkait instrument-instrumen serta komponen-komponen yang ada dalam ekonomi Islam.

Peran ekonomi syariah dalam entrepreneur syariah akan bisa berjalan dengan baik apabila setiap Sumber Daya Insani mampu menjalankan dengan sebaik mungkin serta dukungan penuh dari pemerintah dengan regulasi yang mempermudah pelaku usaha dalam mengerakkan perekonomian melalui bisnis yang telah ditekuni.

Ekonomi Islam memiliki peran dalam mendukung implementasi SDGs di Indonesia dengan segala ekosistem produk yang ada. Mulai dengan produk keuangan, aneka makanan dan minuman halal, enterpreuner islami dan lain-lain. SDGs memiliki 17 tujuan, antara lain, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Peran ekonomi syariah dalam SDGs di Indonesia adalah

Karakteristik yang ada dalam keuangan syariah ini cocok untuk mencapai SDGs, seperti dana sosial dan sifatnya yang bebas dari spekulasi. Selain itu, akad-akad yang ada dalam keuangan syariah, khususnya dalam sektor pertanian seperti *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Murabahah, Ba'i Salam* serta bisnis yang berbasis syariah dengan produk makanan dan minuman halal dan juga enterpreuer Islami dengan aneka akad syariah seperti Salam dan Ijarah dalam *Franchise, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Murabahah* dalam perternakan dan pertanian sangat menunjang SDGs.

Keberadaan Lembaga Keuangan Perbankan dan Nonbank menjadi factor utama dalam menyebarkan ekosistem keuangan syariah yang didalamnya terdapat nilai dan prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Perbankan dan Nonbank yang memegang teguh prinsip dan nilai syariah diharapkan menjadi motivator atas terleksanakan SDGs yang telah diharapkan bangsa Indonesia bisa terwujud secepat mungkin. Karena dengan terpenuhinya inklusi keuangan dalam sektor perekonomian diyakini mampu mempercepat perkembangan SDGs serta memiliki harapan besar bangsa Indonesia mampu keluar dari garis kemiskinan.

Lembaga Keuangan Syariah menjadi penopang dalam pemenuhan dana yang dibutuhkan masyarakat dalam melakukan segala bentuk kegiatan ekonomi sehingga diharapkan mampu menghilangkan spikulasi harga yang akan disalahgunakan oleh para pemangku kepentingan demi mendapatkan keuntungan yang bila dibiarkan akan mengarah sistem riba. Dan umat muslim telah dilarang manjalankan sistem riba dalam sega aspek kehidupan. Karena hal itu akan membuat seseorang terjauhi dari rahmat Allah SWT.

KESIMPULAM

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa: Peran ekonomi syariah dalam SDGs di Indonesia adalah Karakteristik yang ada dalam keuangan syariah ini cocok untuk mencapai SDGs, seperti dana sosial dan sifatnya yang bebas dari spekulasi. Selain itu, akad-akad yang ada dalam keuangan syariah, khususnya dalam sektor pertanian seperti *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Murabahah, Ba'i Salam* serta bisnis yang berbasis syariah dengan produk makanan dan minuman halal dan juga enterpreuer Islami dengan aneka akad syariah seperti Salam dan Ijarah dalam *Franchise, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Murabahah* dalam perternakan dan pertanian sangat menunjang SDGs.

Saran dalam penelitian ini adalah para Sumber Daya Insani harus senantiasa bersinergi dengan pemerintah sehingga dapat membantu pergerakan atas kemajuan perekonomian negara Indonesia dalam mewujudkan SDGs. Dan perlu adanya sinergitas dari pelaku usaha, pendidik, pemerintah dan ulama dalam memajukan perekonomian bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mishri. (1993). USHUL AL-IQTISHAD AL-ISLAMI. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Azhar.Imam. (2016). METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA. Yogyakarta: Penerbit Insyira.
- Deddy Mulyana. (2013). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: PARADIGMA BARU ILMU KOMUNIKASI DAN ILMU SOSIAL LAINNYA. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Madkur, 'Ali Ahmad. (1990). MANHAJ AL-TARBIYYAH FI AL-TASAWWUR AL-ISLAMIIY. Beirut, Lubnan: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah
- Mickael B. Hoelman dkk, (2015). PANDUAN SDGS UNTUK PEMERINTAH DAERAH (KOTA DAN KABUPATEN) DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH: Infid
- Moeloeng, (1996). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF . Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Akram Khan. (1994). AN INTRODUCTION TO ISLAMIC ECONOMICS, ISLAMABAD, Pakistan: International Institute of Islamic Thoughts and Institute of Policies Studies.
- Muhammad Abdul Mannan. (1985). EKONOMI ISLAM: TEORI DAN PRAKTIS, JILID. 1, TERJ. Radiah Abdul Kader. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen
- Nurzaman, Mohammad Soleh. (2019). PENGANTAR EKONOMI ISLAM: SEBUAH PENDEKATAN METODOLOGI. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Sufyati, Sappeami, Latifah, Eny dkk. (2022). MENGENAL LEBIH DEKAT EKONOMI SYARIAH. Purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Veitzhal Rivai (2009). ISLAMIC ECONOMICS: EKONOMI SYARIAH BUKAN OPSI, NAMUN SOLUSI. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyu Purhantara. (2010) METODE PENELITIAN KUALITATIF UNTUK BISNIS .Yogyakarta: Graha Ilmu.

www.kemenkeu.go.id